

## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Modayag)

*Sultan Afrian Sutami<sup>1</sup>*  
*Marlien T. Lopian<sup>2</sup>*  
*Wiesje Wilar<sup>3</sup>*

### Abstrak

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Desa Purworejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yakni mengenai partisipasi politik masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Modayag dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dengan menggunakan teori teori Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik dengan melihat aspek-aspek Pemberian suara dalam pemilu; Menghadiri rapat umum dan Menjadi anggota partai. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ketiga aspek yang diteliti tersebut berjalan dengan baik dengan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pilkada sebesar 94.5%.

**Kata Kunci : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Di zaman demokrasi seperti sekarang ini, Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem perpolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari perubahan politik, makna pemilukada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan yang besar agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pemilukada baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.

Memahami pilkada secara langsung merupakan suatu persoalan, karena hal ini hanya sebagai bagian dari rezim otonomi daerah dan bukan pada rezim pemilu. Secara konseptual, pilkada secara langsung merupakan bagian dari pemilu. Hanya saja yang membedakannya dengan pemilu legislatif dan presiden ialah terletak pada lokasinya saja. Dimana pilkada berada pada tingkat daerah, sedangkan pemilu legislatif

dan presiden berada pada skala tingkat nasional.

Begitu pentingnya peran masyarakat dalam pemilu khususnya pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota secara langsung partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemilukada. Hal itu dipahami mengingat dalam pemilukada secara langsung tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke bilik suara untuk memilih calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat menentukan apakah pemilukada dilangsungkan dalam satu putaran atau dua putaran.

Menurut Rahmat Hollyson MZ (2015;17) dalam bukunya yang berjudul *Pilkada, Penyebab masyarakat memilih golput pada saat pemilihan kepala daerah adalah tingginya tingkat kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan, selain itu rendahnya tingkat kesadaran politik dari sebagian masyarakat karena disebabkan oleh berbagai hal seperti tingkat pendidikan yang rendah, sikap apatis dan juga sosialisasi yang tidak maksimal yang didapat oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.*

Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020 adalah angka golput yang mencapai 5% pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hal ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara mereka untuk memilih pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah beberapa kali mengadakan pemilihan, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 dari hasil pemilihan tersebut terlihat rendahnya partisipasi masyarakat khususnya

di Desa Purworejo Kecamatan Modayag yang hanya mencapai 66%.

Namun untuk partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Desa Purworejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 94,56% dengan total pemilih 368 yang terdaftar dalam DPT. Dan yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 5.44%. artinya tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat meskipun dihadapkan dengan pandemic covid 19.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tak menyurut niat masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Bolsel), untuk menyalurkan hak suara masyarakat. Terbukti, tingkat partisipasi publik Bolsel di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan Tahun 2020 dinilai tinggi se Sulawesi utara

Partisipasi politik masyarakat juga bukan hanya dinilai dari tingginya pemilih di TPS, namun juga dinilai berdasarkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik seperti keikutsertaan dalam berbagai kegiatan politik contohnya rapat, keanggotaan partai, lobi dengan pejabat dan hal lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik lainnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti jumlah pemilih yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Modayag berjumlah 368 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 sebesar 357 orang artinya mendekati 100%. Partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Desa Purworejo Kecamatan Modayag dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi.

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Kecamatan Modayag Desa Purworejo dalam Pilkada tahun 2020 merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi. Selain sebagai pemenuhan target partisipasi juga dapat dimaknai sebagai keberhasilan institusi dan lembaga proses demokrasi dalam meningkatkan kesadaran

berdemokrasi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran berdemokrasi yang tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai fenomena seperti halnya mobilisasi suara. Pilihan mereka dapat disebabkan oleh berbagai pertimbangan misalnya mereka memilih atas dasar paksaan, ikut-ikutan, atau memang berdasarkan pilihannya sendiri dan atau hanya menjadi objek politik praktis.

Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pendidikan politik itu sendiri, padahal masyarakat sangat berperan penting dalam kegiatan politik. Fakta yang dapat di gali dari lapangan adalah bahwa masih adanya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa dibekali dengan kesadaran dan pemahaman yang cukup. Maka dari itu masih banyak oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan akan politik dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat yang kemudian menjadi sebab partisipasi politik pun berjalan dengan tidak sehat dengan adanya praktik jual beli suara. Penggunaan hak politik masyarakat tidak diiringi dengan pendidikan politik yang memadai

## Pustaka

### Konsep Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarto (2008 : 367) Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan Negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan

partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari Bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara ( Soeharno: 2004; 102).

Menurut Miriam Budiarmo (Anwar Arifin 2015:78) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Selanjutnya Ramlan Surbakti (Cholisin 2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

### **Fungsi Partisipasi Politik**

Menurut Robert Lane (Soeharno, 2004: 107) partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu;

1. Fungsi *pertama* sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan

arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.

2. Fungsi *kedua* sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan 4ocus44 pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
3. Fungsi *ketiga* sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
4. Fungsi *keempat* sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

### **Konsep Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah Bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan

berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) tahun 2008, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu atau diartikan sebagai segolongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu (Sinaga, 2013:10).

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1)Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3)Kontinuitas waktu, 4)Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

### **Konsep Pemilihan Kepala Daerah**

Menurut Ramlan Surbakti (2010:181) Pemilihan Umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Selain itu Ali Moertopo (1974:30) mengemukakan bahwa pada hakekatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang mendasar dalam pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, Sudiharto (Yoyoh Rohaniah & Efriza, 2015 : 440) mengatakan Pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyak jumlah warga negara, sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

(Sugiyono 2007:45).

Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Informan dalam penelitian ini terdiri adalah :

- 5 Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Modayag yang menggunakan hak pilih.
- 2 orang PPS
- 2 orang KPPS

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Pemberian Suara dalam pemilu**

Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Penyelenggaraan pemilu serentak bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi (judicial review) yang dilakukan oleh Efendi Gazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak tahun 2013 yang lalu. Dalam amarnya, MK menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.(1) Imperatif putusan tersebut, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Argumen utama penyelenggaraan pemilu serentak yang eksplisit disebut dalam putusan MK adalah bagaimana memperkuat sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilihan dari sisi anggaran, waktu dan pengelolaan konflik.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- a. Langsung Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

- b. Umum Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
- c. Bebas Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. Jujur Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat terhadap proses demokrasi di Negara dibuktikan dengan adanya kegiatan yakni memberikan suara pada hari pemungutan suara. Pemberian suara masyarakat merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020. dimana masyarakat Kabupaten Kepulauan didalamnya masyarakat Desa Purworejo ikut serta berpartisipasi dalam pilkada kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk memilih bupati dan wakil bupati. Menurut salah satu informan masyarakat Desa Purworejo yakni Bapak Djemi: *“dalam proses pemilihan kepada daerah Boltim lalu saya ikut mencoblos”*

Hal senada dikatakan oleh Bapak. Ahmad seorang petani Desa Purworejo juga mengatakan: *“ikut mencoblos waktu*

*pemilihan bupati lalu”*

Namun hal berbeda dikatakan oleh Ibu. Siti warga Desa Purworejo mengatakan : *“tidak..saya tidak memilih waktu pemilihan bupati waktu lalu, karena waktu itu saya mau panen di kebun, jadi saya tidak mau tinggalkan”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, untuk terlibat secara langsung dalam proses pemberian suara namun ada juga yang tidak dengan alasan pekerjaan. Dari beberapa masyarakat juga yang kami temui, ada beberapa masyarakat yang memang tidak memilih pada pilkada Boltim 2020 lalu dengan berbagai alasan. Namun kebanyakan adalah alasan pekerjaan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa masyarakat kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya masyarakat Desa Purworejo ikut berpartisipasi dengan cara memberikan suara pada pelaksanaan pilkada kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2017. Namun apabila dikaitkan dengan data sekunder dilapangan, masih ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2020. Dengan data yang ada rata-rata presentase memilih masyarakat mencapai 94.56 %.

Dari informasi yang diperoleh peneliti dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Purworejo bapak Jemi Pangkey mengatakan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Purworejo dapat digolongkan baik karena dalam presentasi kehadiran mencapai 94.5 %: *“bagi saya angka 94.5 % sudah sangat baik karena partisipasi masyarakat diatas 70% namun saya masih menyangkan data tersebut karena alangkah baiknya kalau angkanya mencapai 80%, karena ini scope kecamatan.*

Dari hasil wawancara dengan Ketua P Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Purworejo dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pemberian tergolong baik. untuk capaian partisipasi pada pemilihan kepala daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikatakan sebagai suatu pencapaian

prstasi dalam upaya peningkatan partisipasi politik, melihat target partisipasi secara nasional 77,5% dan pencapaian partisipasi kabupaten Bolaang Mongondow Timur meskipun di Desa Purworejo sudah melebihi target.

Melihat dari jumlah daftar pemilih tetap 368 dan jumlah pemilih 357 dapat dikatakan hampir sebagian besar masyarakat Desa Purworejo ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020 lalu.

Jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 76,21% dan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2014 62% menunjukkan adanya naik turun tingkat partisipasi dan kehadiran masyarakat dalam proses pemberian suara. Pada pilkada kali ini kehadiran masyarakat dalam memberikan suara menunjukkan adanya peningkatan dengan capaian angka partisipasi secara keseluruhan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 79,84% dan untuk Desa Purworejo 94.5%.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa antusias masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020 untuk memilih bupati dan wakil bupati tergolong baik meskipun perlu adanya peningkatan. Jika dibandingkan dengan pemilihan presiden, gubernur, dan legislatif dapat dikatakan antusias dari masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak begitu mengenal figur yang diusung baik dalam pemilihan presiden, gubernur, dan legislative dimana masyarakat biasanya hanya memilih orang-orang yang terkenal saja. berbeda dengan pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati, dimana antusias masyarakat sangat tinggi, selain calon yang berasal dari daerah sendiri masyarakat juga lebih mengenal dan mengetahui secara langsung calon bupati dan wakil bupati yang mereka pilih.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah

satu tokoh masyarakat Bpk. Kifly : *“pada pilkada 2020 saya dapat katakana disambut antusias masyarakat. Partisipasi politik masyarakat berdasarkan kesadaran diri sendiri, hal itu dilihat dari kehadiran masyarakat yang datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Antusias masyarakat lebih tinggi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati karena pemimpin berasal dari daerah sendiri dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan presiden dimana minat partisipasi masyarakat bisa dibbilang rendah”*

Partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Desa Purworejo dalam pemilihan Kepala daerah merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi yang telah mencapai angka partisipasi 94.5% kurang dari target yang ditetapkan oleh KPU Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 80%.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan cirri khas adanya modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Dalam Kegiatan Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung baik itu dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden, dalam pelaksanaannya pasti terjadi pelanggaran didalamnya, karena dalam ajang seperti ini masyarakat merupakan objek dari kegiatan tersebut sehingga berbagai jenis pelanggaran terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat di Desa Purworejo disebabkan berbagi pertimbangan seperti halnya mobilisasi suara. Mobilisasi suara terjadi dalam bentuk pemberian uang

serta pembagian beras kepada masyarakat yang ada. Dari pihak pengawas pemilihan umum kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengatakan tindakan tersebut hanya sampai pada tahapan pelaporan dan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak saksi dan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri yang memilih atas dasar keinginan dan dorongan diri sendiri dengan melihat visi dan misi serta kemampuan dari calon yang mereka pilih itu sendiri. Ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Adanya Partisipasi masyarakat Desa Purworejo dalam Pemberian Suara sejalan dengan teori dari Miriam Budiardjo (Anwar Arifin 2020 : 78) tentang partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara yang secara langsung mempengaruhi kebijakan public (*Public Policy*). Dimana masyarakat kabupaten Bolaang Mongondow Timur didalamnya masyarakat Desa Purworejo ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah untuk memilih bupati dan wakil bupati kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020 dengan cara datang ke TPS dan memberikan suara dalam pelaksanaan pemilukada tahun.

## 2 Menghadiri Rapat Umum

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti

rapat umum pada pilkada Boltim tahun 2020 di Desa Purworejo bisa dikatakan baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bpk. Rivan seorang anggota PPS Desa Purworejo yang mengatakan: *“bicara soal rapat umum kita juga bicara soal partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kampanye. Dari yang saya lihat karena saya terlibat langsung dalam kampanye masyarakat sangat antusias dalam menghadiri kampanye, sebagian besar ikut agar dapat mengetahui visi dan misi dari pasangan calon, tapi ada juga yang hanyaikut-ikutan meramaikan saja”*

Hal serupa juga dikatakan oleh Bpk. Fahmi. seorang tokoh masyarakat mengatakan: *“antusias dan keinginan masyarakat dalam menghadiri rapat umum yaitu kampanye bisa dikatakan cukup baik, dilihat pada waktu pelaksanaan kampanye dan kehadiran masyarakat dalam kampanye, yang tentunya ingin mengetahui visi dan misi dari pasangan calon yang mereka dukung”*

Dalam pelaksanaan pemilihan umum kegiatan rapat umum yang paling banyak dihadiri oleh masyarakat adalah kegiatan kampanye. Sebagian besar masyarakat ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Kehadiran masyarakat merupakan wujud dukungan masyarakat kepada pasangan calon yang mereka dukung.

Dari pernyataan informan tersebut, terlihat bahwa adanya partisipasi politik masyarakat dalam menghadiri rapat umum. Melalui rapat umum yang digelar dalam bentuk kampanye dilapangan terbuka, masyarakat dapat melihat dan mendengar secara langsung Visi dan Misi dari pasangan calon yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa hasil dari masyarakat menghadiri rapat umum dalam hal ini kampanye adalah masyarakat dapat mengetahui visi dan misi dari setiap pasangan calon yang mereka pilih. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan masyarakat dalam berpartisipasi secara sukarela yang didasari oleh pemahaman dan kesadaran politik yang baik, dimana masyarakat berpartisipasi dan ikut menentukan pilihan

bukan karena menerima uang akan tetapi lebih kepada penilaian visi dan misi dari setiap pasangan calon yang mereka pilih dengan harapan visi dan misi itu benar-benar akan direalisasikan ketika calon yang didukung itu terpilih dalam pemilukada kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020.

Alasan lain yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi karena adanya hiburan yang diberikan dari pihak tim sukses pasangan calon yang ada dengan menghadirkan artis dalam kegiatan kampanye. Hal ini tentunya menarik keinginan masyarakat untuk datang menghadiri kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye sebagian besar masyarakat biasanya hanya fokus pada hiburannya saja, jika ditanya bisa dikatakan hanya sebagian kecil masyarakat yang menyimak dengan baik apa yang disampaikan pada saat kampanye. Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui juga bahwa masyarakat ikut kampanye karena biaya transportasi dan kendaraan sudah disiapkan oleh tim sukses yang ada, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan uang pada saat pelaksanaan kampanye. Kegiatan kampanye juga seringkali dijadikan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana kekuatan masa pendukung dari setiap pasangan calon yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat umum sejalan dengan Teori dari Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik dimana salah satu indikatornya adalah menghadiri rapat umum. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan masyarakat seperti yang telah disampaikan diatas bahwa masyarakat Desa Purworejo turut terlibat dan berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye pada Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

### 3 Menjadi Anggota partai

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya

adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. (Wikipedia.com)

Partisipasi politik masyarakat untuk menjadi anggota partai tergantung situasi dan keinginan masyarakat, hal tersebut diungkapkan oleh Bpk. Djon sebagai tokoh masyarakat: *“untuk menjadi anggota dalam sebuah partai politik sangat terbuka bagi semua warga negara, ikut berpartisipasi dalam menjadi anggota sebuah partai politik perlu banyak pertimbangan serta kemauan masyarakat, jadi kesimpulannya bagi saya tidak semua masyarakat ingin menjadi anggota parpol tertentu hanya sebagian saja yang terpanggil dan siap”*

Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Bpk. Hengki masyarakat Desa Purworejo beliau mengatakan : *“saya sendiri bukan anggota partai apapun, saya hanya menjadi simpatisan saja atau tergantung sosok pemimpin yang menjadi calon yang ditawarkan parpol kepada masyarakat.*

Popularitas suatu partai tentunya juga menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk turut ambil bagian dalam suatu partai tertentu. Semakin tinggi popularitas suatu partai maka semakin tinggi juga keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai tersebut, begitu juga sebaliknya semakin rendah popularitas dari suatu partai maka keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai tersebut semakin berkurang. Popularitas suatu partai juga berpengaruh pada penilaian dan kepercayaan masyarakat

terhadap partai yang ada. Untuk menjadi anggota partai memang tidak ada persyaratan yang berbelit-belit, keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai politik dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Partisipasi politik masyarakat untuk bergabung dengan suatu partai bisa berbeda-beda. Seperti halnya ada yang memilih menjadi anggota tetap dari suatu partai, ada juga yang menjadi simpatisan, relawan, dan juga tim sukses dari pasangan calon yang di usung dari partai politik yang ada.

Dari hasil penelusuran dilapangan, di Desa Purworejo, dapat dilihat, sama seperti dengan kecamatan lainnya dimana terdapat juga anggota masyarakat yang menjadi anggota parpol dan menjadi pengurus partai politik, namun kebanyakan masyarakat hanya menjadi simpatisan saja.

Keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam partai politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat untuk bisa terlibat secara langsung dalam proses demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Purworejo turut berpartisipasi dalam menjadi anggota partai meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi menjadi anggota partai. Hal ini tentunya sesuai dengan teori Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik yang mencakup partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota partai, adanya partisipasi masyarakat Desa Purworejo untuk ikut berpartisipasi dalam menjadi anggota partai baik sebagai simpatisan maupun anggota/kader partai. Karena pada hakekatnya Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang lingkungan politik sebagai suprastruktur politik

## Kesimpulan

1. pemberian suara dalam suatu pemilihan menentukan arah demokrasi daerah tersebut oleh sebab itu dalam penelitian ini didapati bahwa Partisipasi politik masyarakat di Desa Purworejo mencapai 94.5% dengan jumlah pemilih tetap 368 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 357 orang. Dari data tersebut dapat dikatakan partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara sangat tinggi, dan melebihi target partisipasi untuk tingkat desa.
2. dilihat dari aspek keikutsertaan masyarakat Desa Purworejo dalam berpartisipasi pada rapat umum dan pertemuan-pertemuan terlihat masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut mereka bertujuan untuk melihat dekat calon pemimpin dan ingin mengetahui visi, misi serta program-program yang ditawarkan.
3. Partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota partai politik tertentu masih tergolong rendah, hal ini karena menurut masyarakat tidak terlalu penting untuk menjadi anggota partai politik namun tetap menjadi simpatisan pada partai tertentu.

## Saran

1. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kedepannya, disarankan kepada penyelenggara yakni KPU dan PPK dan PPS untuk lebih meningkatkan sosialisasi pemilu agar masyarakat mengetahui dan memberikan waktu mereka untuk ikut memilih, hal ini juga berlaku bagi partai politik yang merupakan instrument untuk mencapai kekuasaan, seharusnya turut serta dalam mengajak masyarakat memilih. Serta memberikan Pendidikan politik yang baik kepada masyarakat
2. Untuk menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan rapat umum, disarankan kepada pengurus partai agar membuat agenda yang baik dengan program yang mengena di hati masyarakat dan juga memilih calon yang

disukai masyarakat dengan latar belakang yang jelas agar mudah dikenali oleh masyarakat.

3. Dalam ikut serta dalam menjadi anggota partai politik, KPU dan pengurus partai wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat akan peran dan fungsi partai politik serta keuntungan dan kekurangan menjadi anggota partai politik, agar masyarakat menjadi tahu dan mengenai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Arifin, A. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A, Rahman, H. I. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baswori. Sudukin. Susilo, S. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dalton. 2009. *Comparative Politics Today: A World View, 9<sup>th</sup> edn*. New York: Person Logman.
- Gaffar, J. M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maran, R, R. 2007 *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbur, B. N. 2002. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oed. Mochtar dan Mac Andrew. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Purwoko, B. 2005. *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung: Ekspresi Kedaulatan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Laboratorium Politik Unsoed: Jurnal Swara Politika.
- Rohaniah, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governace Bagian Kedua*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sitepu, A. P. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:

## Sumber-sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
15 Tahun 2011 Tentang  
Penyelenggara Pemilihan Umum.

*Kpu.go.id*

[https://sentolo.](https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu)

[kulonprogokab.go.id/detil/129/  
partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu](https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu)